

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang
- Arikunto' Suharsmi, 2014, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenanda Media Group, Jakarta
- Dimiyati, Johni, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Djalal, Hasjim 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016, *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, FAO sebagaimana dikutip oleh Ade Pujiyono Adhari, 2019, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Natabaya, H.A.S, et.al, 1993, *Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, BPHN, Jakarta
- Parthiana, I Wayan, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Sodik, Dikdik Mohammad, 2014, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta

Simanjuntak, Mangisi, 2018, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta

Tanaka, Yoshifumi, 2019, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, United Kingdom

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 698, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

KEP-518/A/J.A/1/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Perja Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang perubahan atas Perja Nomor: 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar pidana tentang perikanan (*illegal fishing*)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara oleh Korporasi

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-053/A/SKJA/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Petunjuk terkait Eksekusi Hukuman Denda dalam Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan Nelayan/Orang Asing

Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI

Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara dan Benda Sita Eksekusi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana

C. Jurnal dan Tesis

Agustina Merdekawati, *et.al*, 2021, “UNCLOS 1982 and the Law Enforcement Against Illegal Fishing in Indonesia: Judges’ Diverging Perspectives”, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta

Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, 2020, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Semarang diperoleh dari https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/726/pdf_140

Fredericka Nggeboe, 2012, “Suatu Tinjauan tentang Pidana Denda dalam Hukum Positif Indonesia dan Rancangan KUHP”, *Jurnal Legalitas*, Jambi diperoleh dari <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/106/93>

Hajairin, *et.al*, 2022, “Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal IBLAM Law Review*, Bima Nusa Tenggara Barat diperoleh dari <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/81/58>

Haridus, Sudardi, Kresno Buntoro, 2023, “Tinjauan Yuridis Prompt Release Procedure Dalam Menangani Tindak Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Jakarta

Indung Wijayanto, 2015, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Semarang diperoleh dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4956>

Iskandar Wibawa, 2017, “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Mataram diperoleh dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/3077/3383> diakses

I Wayan Edi Kurniawan, *et.al*, 2020, “Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Denpasar diperoleh dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2353/1707>

- M. Amin Hanafi, 2018, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah*, Surakarta diperoleh dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9729>
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta diperoleh dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248>
- Marimin, 2019, “Penerapan Yurisdiksi Negara untuk Menanggulangi dan Mengadili Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Marta Chantal Ribeiro, Fernando Loureiro Bastos, 2020, “Global Challenges and The Law of The Sea”, *Jurnal Contributions to the VIIth Colloquium of the International Association of the Law of the Sea*, Lisbon
- Nimerodi Gulo, 2018, “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096/14069>
- Peni Susetyorini, 2019, “Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Semarang diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20981/15018>
- Roy Huffington Harahap, 2022, “Analisis Yuridis Terkait Pemidanaan Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dikaitkan Dengan Tugas Dan Fungsi Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru
- Selfina Susim, 2015, “Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Manado diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7018/6523>
- Sherief Maronie, 2018, “Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal KKP*, Jakarta diperoleh dari [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20\(11%20Mei%2018\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20(11%20Mei%2018).pdf)

Sudi Haryansyah, 2018, “Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Perikanan Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing”, *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister Universitas Borneo Tarakan, Tarakan diperoleh dari <https://repository.ubt.ac.id/flipbook/baca.php?bacaID=4962>

Syafrill Mallombasang, 2015, “*Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum*”, *Jurnal Humanis Kementerian Hukum dan HAM*, Jakarta diperoleh dari https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015.pdf#page=21

Tatik Sunatri, 2021, “Eksekusi Pidana Denda Terhadap Pelaku Asing Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

D. Internet

Mahkamah Agung RI, “Data Putusan Tindak Pidana Perikanan Warga Negara Asing di ZEEI Tahun 2013-2015”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta diperoleh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

Mahkamah Agung RI, “Data Putusan Tindak Pidana Perikanan Warga Negara Asing di ZEEI Tahun 2019-2021”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta diperoleh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

E. Lain-Lain

Surat Jaksa Agung RI kepada Ketua Mahkamah Agung RI nomor B-006/A/Chk.2/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Penerapan Penahanan dan Pidana Kurungan Pengganti Denda bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan Nelayan/ Orang Asing

Laporan Kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Pusat: Relevansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rumusan Forum Group Discussion Persiapan Penerapan Ketentuan Pelepasan Seketika (*Prompt Release*) Kapal dan Awak Kapal Pelaku Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan